

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN – SIMPAN PINJAM (UEK-SP) SUMA MANDIRI KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



OLEH :

**WILLY JONANDA
NPM : 145310484**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI – S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : WILLY JONANDA
NPM : 145310484
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN – SIMPAN PINJAM (UEK-SP) SUMA MANDIRI KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 21 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Megister, Doktor) baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali mengambil beberapa dari referensi dan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya dan kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Saya Yang Membuat Pernyataan



WILLY JONANDA
NPM: 145310484

ABSTRAK

UEK-SP Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, dalam hal ini berperan dalam membantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah melalui penyaluran kredit atau membantu permodalan pada sektor usaha kecil dan menengah. Selain membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, UEK-SP ini juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar mereka keluar dari lingkungan kemiskinan. Kredit bermasalah yang dihadapi oleh UEK-SP ini merupakan salah satu akibat dari pengendalian internal pemberian kredit yang belum maksimal yang telah dijalankan oleh UEK-SP. Pentingnya pengendalian intern didalam suatu organisasi ini, agar operasi dan sistem yang diterapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah penyalahgunaan sistem.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penganalisaan terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang telah penulis dapatkan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UEK-SP Suma Mandiri maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri belum berjalan dengan efektif.

Kata Kunci : Analisis, Sistem Pengendalian Intern, Pemberian Kredit

ABSTRACT

UEK-SP Suma Mandiri Village Sumailang Village Pekanbaru District Pekanbaru City, in this case plays a role in helping the problems faced by small and medium enterprises through lending or assisting capital in the small and medium business sector. In addition to helping the community's economic business to be more advanced and independent in achieving a prosperous life, the UEK-SP also has a function to empower the economy of the poor so that they can get out of the poverty environment. The problematic credit faced by the UEK-SP is one of the consequences of internal control. UEK-SP has not provided maximum credit. The importance of internal control within an organization, so that the operations and systems implemented can run well so as to prevent misuse of the system.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Internal Control System for Credit Provision in the Economic Business of Suma Mandiri Savings and Loans Village (UEK-SP) Suma Mandiri Village, Sumailang Village, Pekanbaru District, Pekanbaru City.

The data collection technique used in this research is by using interview and documentation methods. In analyzing the data the author uses a descriptive method, namely analyzing the facts encountered in the field, then connecting with the theories that the author has obtained, so that a conclusion can be drawn which is a solution to the problem at hand.

Based on the results of research that has been carried out at UEK-SP Suma Mandiri, it can be concluded that the internal control system for lending at UEK-SP Suma Mandiri has not been running effectively.

Keywords: Analysis, Internal Control System, Credit Provision

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru**”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin umat yang membawa kebenaran dan ilmu pengetahuan, semoga kita semua menjadi hamba-Nya yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah dan jauh dari larangan-Nya, amin.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku rector Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin Kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
2. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak. CA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang telah memberikan izin Kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
3. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang memberi motivasi kepada penulis

4. Alm. Hariswanto, SE, M.Si. Ak. CA. CPA selaku Pembimbing I yang semasa hidupnya banyak membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
5. Dina Hidayat, SE. M.Si, Ak. CA selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi, khususnya Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama beberapa tahun ini;
7. Pemilik dan pengurus Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Joni Marjono dan Ibunda Erida Dahlan serta abangku Vicko Jonanda yang tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil, waktu, kesempatan, kesabaran, motivasi dan cinta kasih sayang serta doa dalam penyusunan skripsi ini;
9. Untuk rekan-rekan seangkatan 2014 Akuntansi yang tidak bisa dibuatkan satu persatu terima kasih kebersamaannya yang sangat berarti bagi penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis

Willy Jonanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1. Telaah Pustaka	10
2.1.1. Pengendalian Intern dan Komponen Pengendalian Intern.....	10
2.1.2. Sistem Pengendalian Intern	13
2.1.3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern	14
2.1.4. Lingkungan Pengendalian	14
2.1.5. Pengertian Kredit.....	16
2.1.6. Pengendalian Intern Kredit dan Kebijakan Kredit.....	16
2.1.7. Penyelesaian Kredit Bermasalah	20

2.2. Penelitian Terdahulu.....	21
2.3. Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Desain Penelitian	24
3.2. Objek Penelitian	24
3.3. Jenis dan Sumber Data	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data	25
3.5. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Gambaran Umum UEK-SP Suma Mandiri Kelurahan Sumahilang	27
4.2. Hasil Penelitian	28
4.2.1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada UEK-SP Suma Mandiri	31
4.2.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern penyaluran kredit pada UEK-SP Suma Mandiri	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Kolektibilitas Kredit UEK-SP Suma Mandiri Periode 2018-2019	6
-----------	--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengendalian intern merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban suatu organisasi atas usaha yang dijalankan, dalam upaya meningkatkan serta menjaga kekayaan, mengecek keandalan dari manajemen, sesuai atau tidaknya dengan tujuan yang ingin diraih bersama. Pentingnya pengendalian intern didalam suatu organisasi ini, agar operasi dan sistem yang diterapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah penyalahgunaan sistem. Sistem pengendalian intern juga memberikan pengarahan-pengarahan manajemen yang memadai. Hal itu dikarenakan sistem pengendalian intern merupakan kebijakan, dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan memberikan keyakinan bahwa tujuan tertentu suatu usaha akan tercapai.

Mulyadi (2014:163) mengatakan pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Defenisi pengendalian intern berlaku baik dalam perusahaan yang mengelola informasinya secara manual dengan desain pembukuan maupun dengan sistem komputerisasi.

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah

dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Dengan kecilnya penyaluran kredit, maka akan dapat mengurangi kerugian dalam perusahaan. Kredit yang diberikan usaha simpan pinjam kepada nasabah atau debiturnya mengandung resiko yang sangat besar, karena kredit mudah diselewengkan dan disalah gunakan. Untuk itu penyaluran kredit yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat oleh pihak usaha simpan pinjam membutuhkan adanya pengawasan yang terprogram dan terkendali. Sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar diberikan kepada nasabah yang dapat dipercaya untuk melunasinya tepat waktu. Untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pihak simpan pinjam maka harus diadakan suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem pengendalian tersebut dikenal dengan istilah pengendalian intern.

UEK- SP adalah singkatan dari usaha ekonomi kelurahan-simpan pinjam, yaitu lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di kelurahan yang bersangkutan. Kredit UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam) yaitu merupakan pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu, dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atau jasa pinjaman.

Salah satu UEK-SP yang ada di Kota Pekanbaru adalah UEK-SP Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, dalam hal ini berperan dalam membantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah melalui penyaluran kredit atau membantu permodalan

pada sektor usaha kecil dan menengah. Selain membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, UEK-SP ini juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar mereka keluar dari lingkungan kemiskinan.

Prosedur pemberian kredit kepada nasabah pada Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) Suma Mandiri adalah sebagai berikut : Tahap Pertama, calon nasabah mendatangi UEK-SP Suma Mandiri guna mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis yaitu dengan mengisi formulir dan mengajukan proposal pinjaman yang telah disediakan (Lampiran 9). Dengan melampirkan persyaratan-persyaratan seperti, foto copy KTP yang mengajukan kredit, Kartu Keluarga, Rencana Usaha Pemanfaat (RUP), surat pernyataan kesediaan Agunan, foto copy buku rekening tabungan Bank, pas foto 3 x 4 satu lembar, foto copy surat agunan, rencana pengembalian kredit.

Tahap kedua, calon nasabah menyerahkan proposal dan persyaratan-persyaratan kepada bagian tata usaha. Bagian tata usaha memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah, jika persyaratan belum lengkap maka bagian tata usaha akan mengembalikan proposal dan syarat tersebut kepada calon nasabah untuk dilengkapi dan bagian tata usaha memberi jangka waktu kepada calon nasabah selama satu minggu untuk melengkapinya, jika dalam jangka waktu tersebut calon nasabah tidak dapat memenuhi syarat maka pemberian kredit tersebut dibatalkan dan jika telah terpenuhi maka nasabah menyerahkannya kembali kepada bagian tata usaha. Bagian tata usaha mengecek kembali, jika sudah lengkap maka bagian tata usaha mencatat nama sipemohon

kredit dalam buku register (Lampiran 9).

Tahap ketiga, proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP/RUA) diajukan ke staff analis kredit untuk dianalisis. Staff analis kredit memeriksa kelayakan proposal dan syarat-syarat apabila telah sesuai dan memenuhi syarat.

Tahap keempat, staff analis kredit akan mewawancarai calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap.

Tahap kelima, staff analis survey ke lapangan untuk mengetahui tempat tinggal, tempat usaha, kesesuaian pinjaman dana dengan kebutuhan usaha dan kebenaran nilai agunan yang diajukan dan juga mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam.

Tahap keenam, wawancara kedua yaitu perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan setelah dilakukan survei dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat survey ke lapangan apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

Tahap ketujuh, tahap keputusan kredit, akan dilakukan rapat oleh ketua UEK-SP Suma Mandiri, Tata Usaha, Kasir, Staff Analisis Kredit, kepala kelurahan, ketua lembaga pemberdaya masyarakat, wakil perempuan, pengawas umum/BPK, dan kader pembangunan masyarakat, membahas hasil survey lapangan untuk menentukan apakah kredit yang telah diajukan calon peminjam atau nasabah layak untuk diberikan atau ditolak.

Tahap kedelapan, setelah semua data-data dan legalisasi disetujui maka pihak pengelola UEK-SP Suma Mandiri akan membuat surat perjanjian

pemberian kredit (SP2K) antara nasabah dengan pihak UEK-SP. Ketua UEK-SP Suma Mandiri dan pengelola UEK-SP Suma Mandiri mengundang nasabah untuk membicarakan hasil proposal, yaitu membicarakan tentang cara pembayaran cicilan kredit, serta memberikan arahan kepada nasabah sebelum kredit dicairkan. Setelah selesai ketua UEK-SP Suma Mandiri dan pengelola UEK-SP Suma Mandiri akan menandatangani surat perjanjian pemberian\ kredit (SP2K).

Tahap terakhir, bila semua ketentuan pinjaman telah terpenuhi dan disepakati maka kasir dan ketua akan mencairkan dana dari rekening UEK-SP Suma Mandiri. Pemohon kredit dapat mengambil dananya kepada kasir UEKSP Suma Mandiri setelah surat perjanjian sudah terpenuhi, dan kasir mencatat dibuku pengeluaran kas atau daftar uang keluar atas dana kredit yang telah dikeluarkan.

Peminjam wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan isi Surat Pemberian Peminjaman Kredit (SP2K) dengan memperhatikan jenis dan siklus usaha. Pihak UEK-SP Suma Mandiri tidak melakukan pemantauan penggunaan dana setelah dana dicairkan.

Penetapan kolektibilitas pada UEK-SP Suma Mandiri berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/Pbi/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Berdasarkan hasil survey dan data yang sudah penulis dapatkan dari ketua UEK-SP Suma Mandiri ini, terdapat indikasi terjadinya kredit macet pada tahun 2018 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 123.834.808,- dan pada tahun 2018 jumlah tunggakan sebesar Rp. 90.805.371,- dengan kolektibilitas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Kolektibilitas Kredit UEK-SP Suma Mandiri Periode 2018-2019

Kolektibilitas	Kriteria	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Saldo Pinjaman	Tunggakan	%	Saldo Pinjaman	Tunggakan	%
I (0 Bulan)	A	606.500.00	0	0	689.024.000	0	0
II (1-2Bulan)	B	24.886.350	13.221.367	53	84.059.000	7.266.057	9
III (3-4)	C	40.864.000	26.401.733	65	11.318.800	8.867.407	78
IV (5-6)	D	6.057.500	3.407.108	56	9.077.000	6.071.000	67
V (>6 Bulan)	E	94.092.000	80.804.600	86	89.099.500	68.600.907	77
Jumlah		772.399.85	123.834.80		882.578.300	90.805.371	

Sumber: Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam Suma Mandiri

Dari tabel 1.1 dapat diketahui setiap tahunnya terdapat tunggakan atas kredit yang diberikan oleh pihak Bumdes. Tunggakan ini dapat disebabkan karena tidak sesuainya jumlah pendapatan yang diterima anggota dengan jumlah angsuran atau tunggakan kredit yang akan dibayarkan setiap bulannya sehingga dapat berdampak pada kredit macet.

Kredit bermasalah yang dihadapi oleh UEK-SP ini merupakan salah satu akibat dari pengendalian internal pemberian kredit yang belum maksimal yang telah dijalankan oleh UEK-SP. Pentingnya pengendalian intern didalam suatu organisasi ini, agar operasi dan sistem yang diterapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah penyalahgunaan sistem.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dilakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang mengangkat judul : **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada UEK-SP Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru sudah Efektif.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru .

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah :

- a. Bagi penulis menambah wawasan mengenai efektifitas sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru .
- b. Bagi UEK-SP Suma Mandiri, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi UEK-SP Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dalam menciptakan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik terhadap pemberian kredit yang dapat diterapkan secara efektif.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti dimasa yang akan datang, khususnya dengan judul penelitian yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman bagi penulis, maka penulis membagi dalam enam bab yang terperinci menjadi beberapa sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan uraian teoritis mengenai teori yang berkaitan dengan permasalahan khususnya mengenai system pengendalian internal dan kredit serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian, yang berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dan akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri

Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru mengenai system pengendalian internal terhadap kredit yang diberikan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah dilakukan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pengendalian Intern dan Komponen Pengendalian Intern

Menurut Widjaja (2014:24) pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut : Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan personel lain dari suatu entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian golongan tujuan yaitu efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Sedangkan Mulyadi (2014:163) menyatakan bahwa : Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya manajemen.

Marom (2015:2) menjelaskan bahwa : pengendalian internal memiliki pengertian secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit merupakan internal check, yaitu melakukan pengujian atas kebenaran perkalian, penjumlahan dan pengurangan angka-angka yang tertera dalam formulir, serta penelitian cara penjurnalan (pencatatan). Dalam pengertian luas, pengendalian internal tidak sekedar menguji kebenaran angka-angka dan pencatatan, tetapi mencakup mekanisme dari seluruh perangkat yang digunakan manajemen untuk

melaksanakan fungsi pengawasan.

Berdasarkan definisi-definisi para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang sangat penting yang dijalankan oleh semua personil yang terlibat dalam organisasi, mulai dari skala yang kecil sampai dengan skala yang luas demi tercapainya efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan dalam organisasi.

Posisi pengendalian internal dalam perusahaan menjadi sangat krusial karena menyangkut kontrol terhadap seluruh kegiatan organisasi. Dapat dibayangkan ketika pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan muncul permasalahan-permasalahan internal seperti tidak andalnya laporan keuangan, kecurangan-kecurangan, dan kualitas kerja yang rendah. Selain itu, permasalahan dari eksternal dapat berupa kredit macet. Komponen pengendalian intern antara lain (Marom, 2015:8):

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan

fungsi.

3. Penafsiran risiko

Penafsiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh, penaksiran risiko dapat ditunjukkan sebagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan.

Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan dengan peristiwa atau transaksi khusus. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sekali risiko diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya kemungkinan terjadinya, dan bagaimana hal itu ditanggulangi. Manajemen dapat membuat rencana, program, atau tindakan yang diajukan ke risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko karena pertimbangan biaya atau yang lain

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi terdiri dari metode yang catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan pelaporan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas

terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kuantitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya.

2.1.2. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014: 163) sistem pengendalian intern meliputi: Organisasi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor melakukan dua macam pengujian (Mulyadi, 2014: 164) :

- a. Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada, auditor melakukan dua pengujian yaitu pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu dan pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat.

- b. Pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. Dalam pengujian tingkat kepatuhan klien terhadap pengendalian intern,

2.1.3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014:164), unsur-unsur pengendalian internal adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat kita lihat bahwa pengendalian internal melibatkan berbagai aspek didalamnya, mulai dari yang bersifat general sampai yang bersifat teknis. Dari semua unsure diatas, mutu karyawan memegang peranan yang paling besar mengingat posisinya sebagai pelaksana sistem. Karyawan yang berkompeten dan jujur pastinya akan linear denan kualitas kerja yang baik. Jika kualitas karyawan sudah baik maka unsur sistem pengendalian internal yang lain dapat diminimalkan keberadaannya.

2.1.4. Lingkungan Pengendalian

Menurut Mulyadi (2014:172) Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur yaitu yang pertama filosofi adalah hal yang menentukan mengapa perusahaan melakukan bisnis tersebut, cara melakukan bisnis, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berbisnis. Setiap perusahaan memiliki filosofinya masing-masing, ada yang melandaskan filosofinya terhadap kejujuran, atau kepada perencanaan, dan lain-lain. Gaya operasi menekankan kepada bagaimana manajer

menjalankan operasional usaha, sebagai contoh ada yang condong terhadap sentralisasi kekuasaan, dan ada yang menekankan kepada desentralisasi kekuasaan.

Kedua, Dewan komisaris dan komite audit pada perusahaan yang go public harus berfungsi sebagaimana mestinya. Dewan komisaris sebagai perwakilan pemegang saham diharapkan dapat secara independen bersama dengan komite audit untuk mengawasi kinerja manajerial. Ketiga, metode pengendalian manajemen adalah cara-cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya sehubungan dengan perencanaan serta pengalokasian segala jenis sumber daya yang dimiliki dan yang keempat kesadaran pengendalian dalam hal ini dapat tercermin dari seberapa responsif manajemen terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh akuntan intern atau akuntan publik.

Menurut Romney (2014:231) faktor-faktor lingkungan pengendalian adalah, yaitu komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika, filosofi pihak manajemen dan gaya operasi, struktur organisasional, badan audit, komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur organisasi, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumberdaya manusia, kebijakan dan praktik-praktik mengenai pengontrakan, pelatihan, pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkan ancaman, resiko, dan pinjaman, pengaruh-pengaruh eksternal dan aktivitas pengendalian.

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen

untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organisasi secara efektif dijalankan secara umum.

2.1.5. Pengertian Kredit

Suyatno (2016:50) menyatakan bahwa definisi kredit adalah sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain dalam hal, pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Sedangkan Kasmir (2014:73) menyatakan bahwa definisi kredit sebagai berikut: Kredit adalah kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuat yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu bunga yang telah ditetapkan bersama.

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah kesepakatan mengenai penyediaan sejumlah dana dari kreditur kepada debitur mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti jangka waktu pelunasan dan juga bunga yang disepakati.

2.1.6. Pengendalian Intern Kredit dan Kebijakan Kredit

a. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian Intern Kredit sebaiknya dimulai dari proses pemberian kredit apakah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak, karena penyimpangan dalam prosedur kredit akan memberikan risiko yang tinggi dan kredit bermasalah akan bertambah besar.

Menurut Mulyono (2014:24) pengertian pengendalian intern kredit sebagai berikut : Pengendalian Kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Menurut Dunil (2015:243) proses perkreditan terbagi dalam beberapa tahap:

1. Tahap evaluasi sampai dengan keputusan persetujuan atau penolakan kredit yang terdiri dari Penelitian Surat Pemohonan Kredit (SPK), penelitian Kelengkapan data, peninjauan atau pemeriksaan Setempat, analisa dan perhitungan kredit serta perhitungan resiko kredit, adpis dan keputusan.
2. Tahap pemenuhan persyaratan kredit sampai dengan pencairan kredit terdiri dari Syarat legal, Syarat jaminan, Akad Kredit (perjanjian Kredit), Pencairan Kredit dan Monitoring
3. Tahap penagihan sejak tanggal jatuh tempo kredit sampai pelunasan dengan kemungkinan eksekusi jaminan kredit, tahap ini terjadi apabila ternyata berubah menjadi kredit bermasalah dan tidak dapat diselesaikan pada waktunya.
4. Pembukuan/Penghapusan kredit macet

b. Kebijakan Kredit

Menurut Puspoprano (2014:138) pernyataan kebijakan kredit adalah volume kredit, kebijakan kredit harus memberikan pedoman umum mengenai volume perkreditan yang diinginkan, biaya kredit, suatu kebijakan kredit juga menyebutkan biaya yang akan dibebankan untuk fasilitas kredit yang diberikan bank. Biaya ini meliputi tingkat bunga, fee, ongkos, denda, dan lain-lain yang

berkaitan dengan kontrak kredit, bauran kredit, kebijakan kredit harus memberikan referensi bauran (struktur) kredit yang ingin dicapai bank dan sebagaimana keseimbangan dari setiap jenis kredit yang layak di dalam pemberian fasilitas kredit. Selain itu bank harus menetapkan batasan (plafon) besarnya kredit yang dapat diberikan oleh bank kepada satu debitur dan faktor lain yang perlu disebutkan dalam kebijakan kredit yaitu mengenai pengaturan kredit. Adakah jenis agunan tertentu yang tidak akan diterima bank, berapa jumlah kredit yang diperkenankan atau mengenai persyaratan untuk memperoleh kredit. Aspek yaitu penyusunan hubungan administrasi bank dan debitur.

Menurut Tizzy (2014:10-11) penilaian kredit dilakukan dalam rangka menilai seberapa jauh permohonan kredit dalam calon nasabah dapat dipercaya dan diyakini untuk diberikan. Ada lima faktor yang lazim dipakai, yaitu :

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa, sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pribadi, cara hidup dan gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social.
2. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi kualitas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
4. *Collateral*, merupakan jamina yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin
5. *Condition*, kondisi ekonomi secara umum juga kondisi ekonomi pada sector usaha peminta kredit juga ikut menjadi bahan pertimbangan bank dalam menemtukan besarnya jumlah kredit yang diberikan.

Menurut Mahmoeddin (2015:10) pengelompokan kolektibilitas kredit sebagai berikut :

1. Kredit Lancar

Suatu kredit dikatakan lancar jika memenuhi kriteria di bawah ini :

- a. Kredit dengan angsuran jika tidak terdapat angsuran pokok, atau cerukan karena penarikan, terdapat tunggakan angsuran pokok, terdapat tunggakan bunga dan terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Kredit dengan angsuran KPR, jika tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau terdapat angsuran Pokok tetapi belum melampaui enam bulan.
- c. Kredit rekening Koran atau tanpa angsuran, jika kredit belum jatuh tempo dan tidak terdapat tunggakan bunga, kredit belum jatuh tempo, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui tiga bulan, kredit telah jatuh tempo dan telah dijatuhkan perpanjangan, tetapi karena kesulitan teknis belum dapat dilakukan perpanjangan, atau terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- d. Kredit diselamatkan, jika memenuhi ketentuan tersebut pada I.A dan I.B serta selama 1 tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok atau bunga tidak terdapat tunggakan.
- e. Cerukan rekening Koran, jika terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

2. Kredit Diragukan

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan tidak lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur dan kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.

3. Kredit Kurang Lancar

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria yaitu:

- a. kredit dengan angsuran, terdapat tunggakan angsuran pokok dan terdapat tunggakan bunga.
- b. Kredit KPR, jika terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui enam bulan, tetapi belum melampaui Sembilan bulan.
- c. Kredit rekening Koran atau tanpa angsuran, jika kredit belum jatuh tempo dan tidak terdapat tunggakan bunga, kredit belum jatuh tempo, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui tiga bulan, kredit telah jatuh tempo dan telah dijatuhkan perpanjangan, tetapi karena kesulitan teknis belum dapat dilakukan perpanjangan, atau terdapat cerukan karena penarikan, tapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- d. Kredit yang diselamatkan, jika tidak memenuhi kriteria tersebut pada I.D dan tidak ada tunggakan, terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada II.A dan II.C dan terdapat cerukan karena penarikan tetapi

jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

4. Kredit Macet

Suatu kredit macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka .waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit dan kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.1.7. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit yang diragukan dan macet. Usaha penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memeberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dihadapi oleh debitur.

Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Dilakukan penilaian ulang atau *review* secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin baik *actual loan problem*, maupun *potensial problem* sehingga UEK-SP Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*).

Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera bila kredit menunjukkan potensi bermasalah (*nonperforming loan*).

Menurut Sutojo (2014:171) adapun hal hal yang menyebabkan timbul kredit bermasalah adalah menurunnya kondisi usaha perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umumnya dan/atau bidang usaha dimana mereka

beroperasi, adanya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani, problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dan oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur, kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain, kesulitan likuiditas keuangan yang serius, munculnya kejadian yang diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam dan watak buruk debitur, (yang dari semula telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit macet dengan membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet tersebut. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yanda Agustias (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)	Analisis Deskriptif	Dari analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa system pengendalian intern terhadap pemberian

		Suma Mandiri Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.		kredit pada UEK-SP Suma Mandiri belum berjalan secara efektif.
2.	Fadrul (2016)	Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Primadana Sejahtera Pekanbaru	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pengawasan belum berjalan dengan baik, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian sudah berjalan dengan baik, dan jika dilihat secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.
3.	Febdwi Sury (2017)	Sistem Dan Prosedur Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Euk-Sp Desa Tanah Merah, Siak Hulu, Kampar	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian diperoleh bahwa pengendalian internal pemberian kredit pada EUK – SP Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah berjalan dengan efektif dari segi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, pengelola yang bermutu, uji tanda.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka maka dapat

diajukan hipotesis sebagai berikut: Sistem Pengendalian Intern atas pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru belum diterapkan secara efektif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penganalisaan terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang telah penulis dapatkan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi.

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan kembali dalam bentuk yang sudah jadi, seperti: Sejarah Singkat dan struktur organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru kemudian diolah dan disusun

kembali oleh penulis yang berasal dari wawancara dengan pihak pengurus, kemudian laporan keuangan UEK-SP yang sesuai kebutuhan dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini adalah wawancara langsung dengan pengurus Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dan karyawan euk-sp mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti meliputi aktivitas euk-sp, sejarah perkembangan EUK SP tersebut dan semua hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dengan mengumpulkan data dengan memfotocopy laporan pertanggung jawaban Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru tahun 2018 dan 20189.

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian di Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Suma Mandiri Desa Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu penganalisaan terhadap

kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang telah penulis dapatkan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum UEK-SP Suma Mandiri Kelurahan Sumahilang

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK – SP) Suma Mandiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang terbentuk berdasarkan SK Lurah Nomor : 01/KPTSSH/V/2009, tanggal 26 Mei 2009 yang disahkan oleh Walikota Pekanbaru, dan merupakan salah satu dari Kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Lembaga ini bergerak dalam Bidang Usaha Ekonomi Kelurahan bidang Simpan Pinjam dan bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Sumahilang. Keanggotaan UEK – SP Suma Mandiri ini terbuka untuk seluruh warga masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Sumahilang yang memenuhi persyaratan.

UEK – SP Suma Mandiri ini merupakan milik masyarakat Kelurahan Sumahilang yang diusahakan dan dikelola oleh masyarakat Kelurahan Sumahilang. Pengelolaan UEK – SP ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota masyarakat Sumahilang yaitu dibentuk berdasarkan Musyawarah Kelurahan yaitu :

- a. **MELDRY ZAGLUL** sebagai Ketua
- b. **MERI YULINA** sebagai Kasir
- c. **REZKIAH, SE** sebagai Tata Usaha

Didalam melaksanakan Tugas – tugasnya berkoordinasi dengan Pemegang Rekening Dana Usaha Keluraha (DUK) yang dipegang oleh 3 (tiga) specimen

antara lain:

1. **Lurah Sumahilang** sebagai Koordinasi
2. **Ketua LPM** sebagai Anggota
3. **Wakil Perempuan** sebagai Anggota

Selain itu, kinerja pengelola UEK-SP baik manajemen, administrasi maupun keuangan senantiasa diawasi oleh Pengawas Umum yang ditunjuk melalui musyawarah terdiri dari 1 (satu) orang. Secara keseluruhan proses dan pengembangan kelembagaan melalui Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau, UEK-SP didampingi oleh seorang konsultan Pendamping dari BPM Bangdes Propinsi Riau yang bertugas mendampingi, membimbing, mengarahkan, serta ikut mengawasi seluruh Tim dalam melakukan semua kegiatan baik dalam bidang ekonomi maupun dibidang sektoral. Untuk membantu dan sekaligus meneruskan tugas pendampingan, pengarahan, serta pengawasan ditunjuk pula seorang kader sebanyak 2 (dua) orang yang disebut Kader Pembangunan Masyarakat (KPM).

UEK-SP merupakan cikal bakal institusi usaha milik kelurahan yang memberikan kontribusi (bagi hasil keuntungan) terhadap Pendapatan Kelurahan. Dengan demikian, yang diuntungkan bukan saja lembaga dan masyarakat saja, akan tetapi akan membantu Kelurahan dalam hal peningkatan Pendapatan Kelurahan yang memang perlu ditingkatkan menuju Kelurahan Sumahilang yang mandiri.

4.2. Hasil Penelitian

UEK-SP merupakan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian yang berada di Kecamatan Peranap yang membantu masyarakat yang berada di

Kelurahan tersebut khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dalam melakukan pinjaman sebelumnya mereka akan didata kebenaran dari data yang mereka isi diformulir permohonan dana ke UEK-SP ter-sebut yang dilakukan oleh staf analisis kredit. Jika data telah dianggap lengkap dan sesuai oleh staf analisis kredit barulah bersama-sama pengelola lainnya me-lakukan rapat perguliran dana dan sebulan setelah itu barulah dilakukan penyeto-ran oleh anggota. Di UEK-SP tidak hanya melakukan pinjaman dana saja namun anggota juga di simpan pinjam melakukan kegiatan menabung rutin tiap bulannya sebagai simpanan mereka yang dapat mereka ambil bila mereka butuhkan.

Dalam menjalankan tugasnya, UEK-SP mempunyai fungsi yaitu mem-berdayakan masyarakat miskin sehingga mampu mandiri, bersaing secara sehat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pemberdayaan merupakan usaha atau langkah-langkah yang dilakukan oleh UEK-SP UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya dengan demikian perekonomian mereka dapat terbantu sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mandiri dan mampu bersaing secara sehat. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha yang ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif sebagai penambahan modal usaha mereka. Dengan demikina mereka dapat terbantu dalam penambahan modal karena pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP memiliki bunga yang riangan sehingga mereka tidak lagi harus meminjam kepada bank maupun tengkulak

dengan bunga yang tinggi. Dengan adanya UEK-SP mereka merasa terbantu dan mereka juga mengatakan bahwa bunga yang diberikan tidak memberatkan mereka.

UEK-SP UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya ada sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu keberhasilan anggota dalam memanfaatkan atau menggunakan dana sehingga ini berpengaruh terhadap kelancaran dalam mengembalikan pinjaman dana. keberhasilan anggota UEK-SP ini dapat terlihat dari kesuksesan usaha dan keadaan ekonominya yang baik. Namun disisi lain pelaksanaan UEK-SP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dilapangan terjadinya penunggakan ini sebabka kemacetan usaha, penyalah gunaan dana dan periku yang tidak baik oleh anggota UEK-SP tersebut sehingga berpengaruh terhadap perguliran dana UEK-SP.

Kredit atau dikenal juga dengan istilah pinjaman yang diberikan kepada debitur atau nasabah tidak selamanya selalu lancar proses pembayarannya, terkadang ada juga debitur atau nasabah yang lalai atau telat membayarnya. Dengan demikian kredit yang diberikan kepada nasabah mengandung risiko yang mungkin terjadi apabila nasabah terlambat atau bahkan tidak membayar atas kredit yang telah diterimanya. Untuk menghindari terjadinya kredit yang bermasalah maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengendalian intern terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam hal ini adalah kegiatan pengecekan secara langsung terhadap tempat usaha, jaminan (agunan), dan

kondisi calon nasabah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam hal ini adalah pihak UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru akan melakukan seleksi terhadap semua calon debitur (calon nasabah) yang mengajukan proposal usulan pinjaman. Seleksi calon nasabah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat sasaran dan dapat diawasi atau dikendalikan oleh pihak UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru sehingga tidak menimbulkan terjadinya kredit macet bagi UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru yang tentunya dapat merugikan nantinya. Seleksi calon nasabah dilakukan sejak pertama kali proposal usulan pinjaman diterima oleh UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

4.2.1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada UEK-SP Suma Mandiri

Sebelum kredit diberikan, terlebih dahulu UEK-SP Suma Mandiri melakukan analisa kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah (pemanfaat). Tujuannya adalah agar persyaratan kredit yang diajukan sudah layak dan tidak ada kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak UEK-SP Suma Mandiri, yang berdampak tidak dapat ditagihnya kredit yang diberikan, sehingga antara pihak UEK-SP Suma Mandiri dan calon nasabah bisa menjalankan aturan dalam pemberian kredit yang sudah ditentukan.

Dalam proses pemberian kredit, pihak UEK-SP Suma Mandiri menerapkan beberapa langkah prosedur yang harus dilakukan, yang bertujuan untuk memastikan kelayakan kredit apakah kredit dapat diterima atau ditolak. Berikut ini adalah prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh UEK-SP Suma Mandiri:

1. Pengajuan Proposal

Sebelum melakukan peminjaman, maka calon nasabah menyerahkan proposal yang berisikan surat pernyataan, kelengkapan syarat yang telah ditentukan oleh pihak UEK-SP serta fotokopi surat anggungan dan persyaratan-persyaratan diberikan kepada bagian tata usaha. Bagian tata usaha memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah, jika persyaratan belum lengkap maka bagian tata usaha akan mengembalikan proposal dan syarat tersebut kepada calon nasabah untuk dilengkapi dan bagian tata usaha memberi jangka waktu kepada calon nasabah selama satu minggu untuk melengkapinya, jika dalam jangka waktu tersebut calon nasabah tidak dapat memenuhi syarat maka pemberian kredit tersebut dibatalkan dan jika telah terpenuhi maka nasabah menyerahkannya kembali kepada bagian tata usaha. Bagian tata usaha mengecek kembali, jika sudah lengkap maka bagian tata usaha mencatat nama sipemohon kredit dalam buku register.

Proposal Rencana Usaha Pemanfaat (RUP/RUA) diajukan ke staff analis kredit untuk dianalisis. Staff analis kredit memeriksa kelayakan proposal dan syarat-syarat apabila telah sesuai dan memenuhi syarat. Staff analis kredit akan mewawancarai calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon

peminjam. Tujuannya untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat memang harus mengikuti prosedur pengajuan melalui proposal pengajuan yang dibuat oleh pihak UEK-SP. Jadi proposal pengajuan ini sudah dilakukan oleh pihak UEK-SP untuk kemudian diberikan kepada nasabah yang akan meminjam uang, akan tetapi adanya proposal yang tidak lengkap pengisiannya karena sudah lebih dari sekali peminjaman pada UEKSP tersebut.

Pada dasarnya seluruh anggota masyarakat Kelurahan/Kelurahan berhak mendapatkan pinjaman dari Dana Usaha Kelurahan/Kelurahan dengan kriteria :

- a. Warga Kelurahan/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Kelurahan/Kelurahan bersangkutan selama minimal 5 tahun
- b. Tercatat sebagai anggota aktif UEK-SP dan telah mempunyai simpanan wajib sebesar minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c. Memiliki usaha dan atau rencana usaha
- d. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha
- e. Untuk peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan
- f. Untuk peminjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000,- per anggota, maka diwajibkan menggunakan Agunan sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimum Rp. 1.000.000 per Anggota Agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (Sesuai dengan kesepakatan Tanggung Renteng dalam kelompok).

- g. Surat pernyataan kesanggupan Tanggung Renteng harus dibuat diatas kertas segel dengan menyebutkan Sumber Dana yang akan digunakan untuk Tanggung Renteng, ditandatangani oleh seluruh Anggota Peminjam atau seluruh Anggota kelompok.

Apabila semua persyaratan telah lengkap, berdasarkan hasil pemeriksaan bagian administrasi maka nasabah dapat mengajukan proposal kredit dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami / istri (2 rangkap)
- b. Foto copy kartu keluarga (KK) (2rangkap)
- c. Pas Foto 3x4 (4lembar)
- d. Foto copy Agunan berupa SKT/SERTIFIKAT/SKGR/BPKB
- e. Surat Keterangan Usaha diatas pinjaman Rp. 15 juta
- f. Foto copy rekening diatas pinjaman Rp. 5 juta

Persyaratan diatas diantar langsung oleh pemanfaat kebagian Tata Usaha, selaku bagian pemeriksa kelengkapan dokumen. Jika telah lengkap, maka selanjutnya akan diserahkan kepada bagian Staff Analisis Kredit (SAK) untuk mengetahui apakah pengisian data dan syarat-syarat sudah sesuai dengan yang diminta oleh UEK-SP Suma Mandiri. Jika terdapat kekurangan terhadap proposal yang diajukan oleh pemanfaat, maka bagian SAK akan memberitahu melalui via telephone atau memberitahu langsung kepada pemanfaat pada saat survey lapangan. Dalam hal ini, pemanfaat diberi waktu selama 1 hari untuk melakukan perbaikan proposal yang telah diajukan. Semua persyaratan diatas bukan menentukan seseorang layak diberi kredit atau tidak, karena hal yang paling

penting yang menjadi pertimbangan UEK-SP adalah kepercayaan dan kelayakan usaha yang akan dijalankan oleh pemanfaat.

2. Survey Lapangan

Pada tahap survey lapangan, Staff Analisis Kredit (SAK) bersama dengan pengelola UEK-SP Suma Mandiri dan Pendamping Kelurahan akan melakukan wawancara langsung kepada pemanfaat/nasabah untuk menilai layak atau tidaknya pemanfaat mendapat pinjaman. Adapun contoh proposal yang peneliti ambil yaitu Afrizon.

- a. Status peminjam, status peminjam yaitu kawin, ini terlihat pada KK pemanfaat.
- b. Usulan pinjaman diketahui ahli waris, usulan pinjaman yang diajukan oleh pemanfaat/nasabah diketahui oleh ahli waris, yang mana ahli warisnya yaitu Yunita (istri) pemanfaat. Dan pemanfaat akan mengisi surat pernyataan ahli waris dan di tandatangi oleh Ahli Waris (pihak pertama), Pemanfaat (pihak kedua), PJ Kelurahan dan Ketua UEK-SP Suma Mandiri.
- c. Nilai ekonomi agunan melebihi 30-40% dari pinjaman saat jatuh tempo, nilai ekonomi agunan yang dilampirkan oleh Afrizon melebihi 30-40%, agunan tersebut BPKB Motor.
- d. Lokasi agunan sesuai dengan proposal, lokasi agunan terletak di Gg. Sukma Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Sumahilang dan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pemanfaat.
- e. Jumlah pekerja, pemanfaat tidak melibatkan pekerja.

- f. Pemasaran hasil usaha, pemasaran hasil usaha hanya dilakukan di kelurahan pedekik.
- g. Pekerjaan lainnya, pemanfaat merupakan Honorer PAUD dan LINMAS Kelurahan.
- h. Usaha yang dilaksanakan sesuai dengan proposal, usaha yang akan dilaksanakan oleh pemanfaat yaitu membuka kedai harian dengan proposal yang diajukan.
- i. Menetap diatas 5 tahun, pemanfaat/nasabah tersebut sudah menetap lebih dari 5 tahun, bertempat tinggal di Gg. Sukma Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Sumahilang Kota Pekanbaru.
- j. Jenis agunan, jenis agunan yaitu BPKB Motor.
- k. Pernah mengalami kredit macet pada pihak lain, pemanfaat/nasabah sebelumnya tidak pernah mengalami kredit macet.
- l. Rencana atau lanjutan usaha, usaha yang diajukan pemanfaat/nasabah ini yaitu lanjutan usaha.
- m. Usaha lainnya, tidak ada usaha lain yang ingin diajukan pemanfaat.
- n. Kelayakan tempat usaha dengan pinjaman, tempat usaha dengan pinjaman yang diajukan pemanfaat yaitu sudah layak.
- o. Kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha, penggunaan dana dengan usaha yang diajukan pemanfaat sudah sesuai.
- p. Kebenaran nilai agunan yang diajukan, kebenaran nilai agunan yang diajukan pemanfaat > 40%.

- q. Kapasitas usaha dengan kemampuan pengembalian, pemanfaat/nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan pinjaman.
- r. Pemahaman terhadap program EUK/K, pemanfaat/nasabah tersebut sudah memahami program UEK-SP Suma Mandiri dengan baik.

Berdasarkan survey lapangan yang sudah dilakukan diatas sudah terdapat unsur-unsur 5C diantaranya adalah:

1. **Characters**, berupa status peminjam, menetap diatas 5 tahun, dan pernah mengalami kredit macet pada pihak lain.
2. **Capacity**, berupa pekerjaan lainnya, usaha yang dilaksanakan sesuai dengan proposal, rencana atau lanjutan usaha, usaha lainnya, dan kapasitas usaha dengan kemampuan pengembalian.
3. **Capital**, berupa kelayakan tempat usaha dengan pinjaman, dan kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha.
4. **Colleteral**, berupa nilai ekonomi agunan melebihi 30%-40% dari pinjaman saat jatuh tempo, lokasi agunan sesuai dengan proposal, jenis agunan, dan kebenaran nilai agunan yang diajukan.
5. **Condition**, berupa jumlah pekerja, pemasaran hasil usaha, pemahaman terhadap program EUK/K, dan usulan pinjaman diketahui ahli waris.

3. Keputusan Kredit

Penyeleksian atau verifikasi dilakukan agar pemberian pinjaman dana bergulir tepat sasaran dalam Program Pemberdayaan Kelurahan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam. Dengan adanya proses penyeleksian atau verifikasi ini diharapkan usaha kecil yang akan dibantu memang betul-betul

layak untuk mendapatkan pinjaman. Penyeleksian ini mengacu kepada petunjuk implementasi simpan pinjam. Agar penetapan penerima pinjaman mengacu kepada masyarakat ekonomi lemah yang memang menjadi sasaran pinjaman dana bergulir. Dengan mendapatkan pinjaman ini diharapkan berpengaruh terhadap bergeraknya kembali roda perekonomian masyarakat.

Sebelum proses verifikasi kepada penerima Program Pemberdayaan Kelurahan dalam kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpana Pinjam, dilakukan terlebih dahulu pembentukan Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan pinjam di tiap kelurahan/kelurahan. Dengan adanya pengelola tersebut maka dapat diusulkan untuk mendapat alokasi dana Program Pemberdayaan Kelurahan. Kriteria kelompok yang layak mengajukan pinjaman Dana Usaha Kelurahan/Kelurahan melalui UEK-SP yaitu :

- a. Mempunyai kepengurusan yang jelas.
- b. Mempunyai anggota minimal 10 orang termasuk pengurus
- c. Mempunyai aturan-aturan kelompok yang tertulis, walaupun secara sederhana.
- d. Mempunyai alamat sekretariat / posko yang jelas
- e. Mempunyai papan nama kelompok di sekretariat / posko
- f. Mempunyai buku daftar anggota kelompok dan jenis usaha ekonomi setiap anggota kelompok
- g. Mempunyai catatan terhadap transaksi yang dilakukan
- h. Mempunyai rencana kerja, walau sederhana
- i. Mempunyai jadwal pertemuan rutin dan catatan hasil pertemuan

- j. Mempunyai tabungan atau simpanan kelompok
- k. Mempunyai surat pengesahan dari Kades/Lurah.

Pada tahap persetujuan ini, dilakukan verifikasi awal oleh pengelola UEK-SP Suma Mandiri meliputi ketua UEK-SP Suma Mandiri didampingi kasir, tata usaha, staff analisis kredit dan pendamping kelurahan. Setelah rapat verifikasi awal disetujui maka akan dilanjutkan dengan rapat verifikasi akhir yang akan dihadiri oleh Lurah, Otorisasi, Pengawas Umum, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pendamping Kelurahan dan Pengelola UEK-SP Suma Mandiri (Ketua, Tata Usaha, Kasir dan Staff Analisis Kredit) membahas hasil survey untuk menyetujui pemberian kredit. Selanjutnya akan dilakukan umpan balik untuk mengetahui apakah calon pemanfaat setuju atau tidak atas hasil keputusan rapat tersebut.

Dalam proses penyeleksian atau verifikasi ini ada beberapa tahap yang harus dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu dalam Program Pemberdayaan Kelurahan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) diantaranya:

1. Tahap seleksi ini berdasarkan permohonan masyarakat kelurahan, para pelaku pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam memverifikasi tentang kelengkapan proposal, peninjauan ke lapangan atau ke tempat usaha calon pemanfaat atau peminjam dan dilakukan umpan balik. Kemudian diputuskan dalam musyawarah kelurahan tentang kelayakan usaha untuk direkomendasikan menjadi peminjam Program

Pemberdayaan Kelurahan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan yang layak diberikan.

2. Tahap selanjutnya diadakan musyawarah di kelurahan tentang perangkian pemberi pinjaman. Jika permintaan sesuai dengan seleksi melebihi dari dana yang ada, maka diprioritaskan untuk urutan yang miskin terlebih dahulu sampai habis dana. Bagi penerima pinjaman yang belum dicairkan dananya dimasukkan ke dalam daftar tunggu untuk perguliran selanjutnya.

4. Legislasi

Dalam tahap legislasi ini, calon pemanfaat harus membuat Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) antara calon pemanfaat dengan UEK-SP Suma Mandiri yang diketahui oleh Lurah dan Pendamping Kelurahan. Dan juga pengelola UEK-SP Suma Mandiri juga membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Kelurahan yang diketahui oleh Pendamping Kelurahan dan Pengawas Umum, serta juga akan dijelaskan langsung tentang cara cicilan kredit dan memberikan arahan kepada calon pemanfaat sebelum kredit dicairkan.

5. Realisasi Kredit

Selanjutnya, bila semua ketentuan pinjaman telah dipenuhi dan disepakati maka kasir dan ketua akan mencairkan dana dari rekening UEK-SP Suma Mandiri yang diketahui dan di tanda tangani oleh pengelola UEK-SP (Ketua, Tata Usaha, SAK dan Kasir), Lurah dan diketahui oleh Pendamping Kelurahan. Setelah dana dicairkan oleh UEK-SP maka Pemanfaat/nasabah dapat mengambil dananya

dibagian kasir. Dana yang dikeluarkan menggunakan kwitansi dan ditanda tangani oleh ketua UEK-SP dan pemanfaat, dan dana tersebut akan dicatat oleh kasir dalam buku pengeluaran kas.

6. Pemantauan

Pemantauan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh suatu lembaga simpan pinjam untuk memantau aktifitas nasabah setelah kredit diberikan, pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan kredit oleh nasabah telah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan.

Dalam hal ini, UEK-SP Suma Mandiri sudah terbentuk tim pemantauan, yang mana dalam pemantauan ini dilakukan oleh pengelola UEK-SP dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan pemantauan ini dilakukan sebulan sekali atau lebih.

4.2.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern penyaluran kredit pada UEK-SP Suma Mandiri

1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab

Pemisahan tugas dan tanggung jawab ini bertujuan agar terciptanya pengecekan secara silang, agar setiap pekerjaan yang melibatkan anggota pengelola UEK-SP Suma Mandiri dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maksud utama dari pemisahan tugas tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dari tanggung jawab yang telah diberikan pada masing-masing karyawan.

UEK-SP Suma Mandiri masih terdapat adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh kasir. Sehingga terjadi penggandaan tugas dan tanggung jawab

dimana bagian kasir disamping bertugas sebagai pengelola kas sekaligus melakukan pencatatan laporan keuangan dalam hal ini dapat dilakukan penyelewengan oleh kasir. Dengan demikian UEK-SP Suma Mandiri belum melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab dengan baik.

2. Sistem otorisasi

Sistem ini bertujuan untuk membatasi pelaksanaan transaksi atas suatu aktifitas oleh sejumlah individu tertentu, otorisasi dapat mencegah terjadinya transaksi dan aktifitas tanpa otorisasi. Otorisasi dan aktifitas diperlukan untuk membantu manajemen mencapai tujuan pengendalian.

Sistem otorisasi pada UEK-SP Suma Mandiri telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tahap realisasi kredit. Pada proses pemberian kredit, dana yang diberikan kepada pemanfaat harus mendapat otorisasi dari Kelurahan, Ketua LKMD (Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan) dan Tokoh Perempuan, setelah mendapatkan persetujuan dari tim otorisasi, pengeluaran kas harus menggunakan kwitansi pembayaran dengan mendapat otorisasi dari ketua UEK-SP Suma Mandiri dan Lurah.

3. Karyawan yang kompeten

Untuk mencapai tujuan dalam perusahaan karyawan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi ini mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan yang merupakan perpaduan antara kecerdasan, pelatihan dan pengalaman.

Pada UEK-SP Suma Mandiri telah mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan manajemen yang ada. Penempatan karyawan sudah sesuai dengan keahlian yaitu kasir mempunyai latar belakang pendidikan S1 Akuntansi syariah dengan mengikuti pelatihan program keterampilan manajemen UEK-SP dan belum ada pengalaman sama sekali sebelumnya, Staff Analisis Kredit (SAK) mempunyai latar pendidikan S1 Akuntansi syariah dengan mengikuti pelatihan manajemen pemberdayaan dan mengalami pengalaman sebelumnya sebagai guru SMA bidang study TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Dengan demikian bahwa karyawan yang ditempatkan di UEK-SP Suma Mandiri sudah sesuai dengan karyawan yang kompeten.

4. Prosedur pencatatan dan dokumen yang memadai

Prosedur pencatatan merupakan tindak lanjut dari proses otorisasi, penggunaan dokumen yang memadai merupakan suatu media yang digunakan untuk merekam pengguna wewenang untuk memberi otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Dalam praktek yang sehat penggunaan dokumen harus dipertanggung jawabkan dan menggunakan nomor urut dokumen.

Pada UEK-SP Suma Mandiri prosedur pencatatan dan dokumen belum berjalan dengan baik, karena UEK-SP Suma Mandiri belum mempunyai sistem akuntansi dan masih cash basis. Pencatatan kredit dilakukan oleh satu orang tanpa ada pembagian tugas, penggunaan dokumen belum berjalan dengan baik, kwitansi yang digunakan tanpa nomor urut. Dengan demikian prosedur pencatatan dan dokumen pada UEK-SP Suma Mandiri belum memadai.

5. Praktek yang sehat

Praktek yang sehat yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk melakukan pembagian tanggung jawab secara fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Praktek yang sehat dalam UEK-SP Suma Mandiri belum berjalan dengan baik, dalam penggunaan formulir tidak menggunakan formulir yang bernomor urut cetak, tidak pernah dilakukan pemeriksaan mendadak, setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu orang, tidak pernah dilakukan cuti karyawan karna jumlah karyawan yang terbatas. Perputaran jabatan dalam struktur organisasi UEK-SP Suma Mandiri belum pernah dilakukan, serta sudah dilakukan pemeriksaan fisik kekayaan dengan catatan. Dengan demikian UEK-SP Suma Mandiri ini belum melaksanakan praktek yang sehat dalam pengendalian intern kreditnya.

4.2.3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit yang bermasalah pada UEK-SP Suma Mandiri pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu pemanfaat/nasabah mengalami ketidaktepatan waktu dalam pembayaran kredit. Kredit bermasalah yang dihadapi oleh UEK-SP Suma Mandiri merupakan salah satu indikasi dari pengendalian intern penyaluran kredit yang dijalankan UEK-SP Suma Mandiri. Tabel dibawah ini memperlihatkan mengenai tingkat kolektibilitas kredit UEK-SP Suma Mandiri menurut jenis usaha.

Tabel 4.1
Daftar Kolektibilitas Kredit UEK-SP Suma Mandiri Periode 2018-2019

Kolektibilitas	Kriteria	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Saldo Pinjaman	Tunggakan	%	Saldo Pinjaman	Tunggakan	%
I (0 Bulan)	A	606.500.00	0	0	689.024.000	0	0
II (1-2Bulan)	B	24.886.350	13.221.367	53	84.059.000	7.266.057	9
III (3-4)	C	40.864.000	26.401.733	65	11.318.800	8.867.407	78
IV (5-6)	D	6.057.500	3.407.108	56	9.077.000	6.071.000	67
V (>6 Bulan)	E	94.092.000	80.804.600	86	89.099.500	68.600.907	77
Jumlah		772.399.85	123.834.80		882.578.300	90.805.371	

Sumber: Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam Suma Mandiri

Dari tabel 4.1 dapat diketahui setiap tahunnya terdapat tunggakan atas kredit yang diberikan oleh pihak Bumdes. Tunggakan ini dapat disebabkan karena tidak sesuai jumlah pendapatan yang diterima anggota dengan jumlah angsuran atau tunggakan kredit yang akan dibayarkan setiap bulannya sehingga dapat berdampak pada kredit macet.

Jika terjadi kredit macet yang menyebabkan suatu kerugian bagi UEK-SP, maka tindakan yang dapat dilakukan terhadap nasabah/pemanafaat yang mempunyai tunggakan kredit yaitu:

1. Apabila pemanafaat tidak membayar angsuran pada 1 (satu) bulan pertama, maka pengelola akan menghubungi via telephone sebagai teguran pertama.
2. Jika \pm 3 (tiga) bulan pemanafaat tidak merespon maka pengelola akan langsung turun kelapangan untuk menemui pemanafaat.
3. Dari point 2, apabila pemanafaat tidak juga membayar angsurannya lebih dari 3 bulan maka pengelola membuat surat peringatan yang berisi agar pemanafaat segera menyelesaikan tunggakannya. Surat peringatan ini langsung diberikan kepada pemanafaat dengan jangka waktu selama 7 hari.

4. Dari point 3, apabila pemanfaat tidak juga membayar angsurannya maka pengelola mengambil kebijakan untuk menyita agunan pemanfaat sampai pemanfaat melunasi angsurannya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak UEK-SP Suma Mandiri tersebut dalam mengatasi tunggakan kredit belum membuahkan hasil. Sebagian besar pemanfaat/nasabah belum berpartisipasi secara maksimal dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak UEK-SP Suma Mandiri dalam menyelamatkan kreditnya. Selain itu pihak UEK-SP Suma Mandiri tidak menjual agunan yang telah ditahan, dengan alasan bahwa UEK-SP Suma Mandiri hanya berbentuk badan usaha milik kelurahan dan dengan alasan sistem kekeluargaan.

Dengan kurangnya upaya yang dilakukan pihak UEK-SP Suma Mandiri dalam menyelesaikan kredit bermasalah, pada tahun 2018-2019 yang mana kredit macet pada tahun 2018 sebesar Rp. 123.834.808,- sedangkan tahun 2019 sebesar Rp. 90.805.371,-.

Dari hasil wawancara yang suda dilakukan dengan pengelola, rata-rata pengelola mengatakan bahwa terjadinya kredi bermasalah disebabkan oleh kesalahan dari nasabah/pemanfaat yang tidak memanfaatkan dan menggunakan dana dengan maksimal sesuai dengan tujuan pengajuan proposal yang dilakukan. Dalam hal ini juga terjadi karena beberapa faktor lain yaitu kurangnya pengendalian intern, pendapatan usaha yang menurun, ketidakpastian kondisi ekonomi, atau bencana alam yang menyebabkan usaha yang dimiliki pemanfaat tidak beroperasi serta karakter pemanfaat yang tidak mau membayar, serta pemanfaat yang menyalahgunakan dana yang telah diberikan, contohnya

pemanfaat yang menggunakan dana kredit untuk keperluan konsumtif seperti membeli peralatan rumah tangga dan alat elektronik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern pemberian kredit tersebut, maka dilakukan dengan cara mengevaluasi unsur-unsur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemberian kredit yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Penetapan kolektibilitas pada UEK-SP Suma Mandiri berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/Pbi/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Berdasarkan hasil survey dan data yang sudah penulis dapatkan dari ketua UEK-SP Suma Mandiri ini, terdapat indikasi terjadinya kredit macet pada tahun 2018 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 123.834.808,- dan pada tahun 2019 jumlah tunggakan sebesar Rp. 90.805.371,-. Setiap tahunnya terdapat tunggakan atas kredit yang diberikan oleh pihak Bumdes. Tunggakan ini dapat disebabkan karena tidak sesuai jumlah pendapatan yang diterima anggota dengan jumlah angsuran atau tunggakan kredit yang akan dibayarkan setiap bulannya sehingga dapat berdampak pada kredit macet.

Hasil analisa dari penelitian yang dilakukan pada tahap pengembalian angsuran pinjaman kegiatan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam ini bahwa masih ada penerima pinjaman yang tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu dan tepat jumlah. Disamping itu, lambatnya para pelaku/pengelola melakukan penagihan dan sanksi terhadap penerima pinjaman atau pemanfaat kegiatan UEK-

SP yang tidak mengembalikan angsuran pinjaman tersebut. Begitu juga bidang pembiayaan tidak secara teratur menertibkan laporan secara berkala status pengembalian pinjaman.

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi, maka berikut ini diuraikan mengenai analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru. Untuk lebih memperjelas hasil penelitian, maka analisis dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian suatu perusahaan mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah falsafah manajemen dan siklus operasi. Manajemen yang terlalu mengutamakan sasaran operasi dan menyimpang dari kebijakan pengendalian bisa secara tidak langsung mendorong karyawan untuk mengabaikan pengendalian.

Di pihak lain, manajemen yang menekankan pentingnya pengendalian dan mendorong dipatuhinya kebijakan pengendalian akan menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai. Komponen-komponen yang berhubungan dengan lingkungan pengendalian meliputi :Nilai integritas dan etika merupakan produk dari standar perilaku dan etika suatu entitas serta bagaimana hal tersebut dikomunikasikan dan ditetapkan dalam praktek. Semua personel harus menjunjung tinggi nilai integritas dan etika yang berlaku dalam lingkungan perusahaan, Komitmen terhadap kompetensi, Personel disetiap tingkat organisasi

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi, Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi mengarahkan tindakan dan sikap manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Sedangkan gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan,

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjang seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi berikut dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya dengan jelas. Pembagian wewenang dan tanggung jawab, Perluasan dan pengembangan struktur organisasi terlihat dari penetapan wewenang dan tanggung jawab. Dalam suatu organisasi harus ada sistem yang mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mengotorisasi suatu transaksi. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia, Aspek penting dalam sistem pengendalian intern adalah personel organisasi. Pelaksanaan pengendalian intern sangat tergantung pada personelnnya. Oleh karena itu, setiap personel dalam organisasi dituntut memiliki integritas yang tinggi, nilai etika dan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan.

Penaksiran Risiko, Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang

berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Informasi dan Komunikasi, Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas serta untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang tersebut. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain.

Aktivitas Pengendalian, Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk-petunjuk dari manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian tersebut meliputi : Pengendalian pengolahan informasi meliputi organisasi pusat pengolahand ata, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data, Pemisahan fungsi bertujuan agar masing-masing karyawan tidak melakukan tugas yang tidak sesuai dengan wewenang dan tugasnya. Pemisahan fungsi harus dibuat dan dirancang dengan jelas mengenai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan tujuan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas. Pelaksanaan transaksi yang terjadi harus dibagi dalam berbagai fungsi sehingga masing-masing fungsi dapat saling mengawasi. Pengendalian fisik meliputi penyimpanan dokumen-dokumen, catatan-catatan serta barang jaminan kedalam almari besi yang atau ruangan yang aman.

Untuk penyimpanan dokumen-dokumen penting tersebut diperlukan almari besi untuk melindungi dokumen-dokumen penting dari perusahaan. Review kinerja ditujukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern. Aktivitas pemantauan ini dilakukan secara terus-menerus pada periode tertentu. Pemantauan harus dilakukan secara teratur dan menyeluruh untuk tiap-tiap bagian yang ada sehingga apabila ada kelemahan dalam sistem pengendalian intern dapat segera diperbaiki tanpa menunggu adanya kesalahan atau kekeliruan.

Dari hasil analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai, dimana analisis dilakukan untuk setiap elemen sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian, dalam lingkungan pengendalian terdapat : tindakan manajemen yang dilaksanakan secara insentif untuk mengurangi tindakan pegawai yang berbuat tidak jujur, kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten, perusahaan telah memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif, perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, terdapat deskripsi tugas pegawai dan kebijakan terkait dalam hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, terdapat kebijakan dan

prosedur kepegawaian dalam upaya mendapatkan SDM yang jujur dan kompeten terhadap tugasnya.

Penaksiran risiko, UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru melakukan penaksiran risiko atas kemungkinan salah saji laporan keuangan yang meliputi kejadian-kejadian internal dan eksternal yang timbul karena perubahan dalam lingkungan operasional atas pemberian kredit dalam perusahaan, penempatan karyawan baru dalam aktivitas pemberian kredit, perubahan dalam sistem informasi pemberian kredit, peningkatan aktivitas pemberian kredit, sosialisasi penggunaan teknologi informasi baru dalam aktivitas pemberian kredit, dan perubahan pada penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dalam pemberian kredit. Informasi dan komunikasi,

Pada UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru telah menunjukkan sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah mampu memberikan keyakinan yang memadai dengan adanya : sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menunjukkan dan mencatat semua transaksi pemberian kredit, terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menggambarkan dengan dasar yang tepat transaksi-transaksi yang cukup rinci untuk membenarkan pengklasifikasian dari transaksi-transaksi dalam laporan keuangan secara wajar, terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk mengukur setiap transaksi pemberian kredit yang benar dalam mencatat nilai moneterinya di dalam laporan keuangan wajar, terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk transaksi pemberian kredit yang

mengungkapkan pemberian kredit yang berhubungan dengan laporan keuangan secara wajar dalam perusahaan, terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan dalam hal posting dan pengikhtisaran yang benar atas transaksi-transaksi pemberian kredit, dan terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan dalam pengotorisasian transaksi pemberian kredit oleh pejabat yang berwenang. Aktivitas Pengendalian,

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen dan harus dilakukan dengan baik. Aktivitas pengendalian meliputi : pengendalian pengolahan informasi, pemisahan fungsi yang memadai, pengendalian fisik, dan review kinerja. Pada UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dalam pemberian kredit harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang, selain itu pihak perusahaan telah melaksanakan aktivitas pengendalian untuk pemisahan fungsi yang memadai yaitu telah dilakukan pemisahan antara kedudukan fungsi akuntansi dengan fungsi otorisasi pemberian kredit serta pemisahan fungsi administrasi kredit dengan fungsi akuntansi pemberian kredit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha ekonomi kelurahan/kelurahan simpan-pinjam di Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dikategorikan belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan usaha ekonomi kelurahan/kelurahan simpan-pinjam menggunakan indikator-indikator planning, organizing, actuating, dan controlling yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan EUK/K-SP. Hal ini yang menyebabkan dalam pengelolaan EUK/K-SP tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang

menghambat pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan/Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah:

a. Sumber Daya Manusia

Pada prinsipnya sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program, karena kualitas sumber daya manusia yang baik maka pelaksanaan program akan berjalan dengan lancar. Didalam menjalankan EUK/K-SP pengelola harus memiliki SDM yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan dapat membantu pemanfaat dalam pengembangan usaha.

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM sangat menentukan maju atau mundurnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas SDM di dalamnya.

b. Karakter pemanfaat EUK/K-SP

Karakter merupakan suatu yang ada pada diri seseorang. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang pekerja keras, mau berusaha, ada yang malas-malasan. Karakter masyarakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola EUK/K-SP. Dilihat dari pertanggung jawaban pemanfaat dalam pengembalian pinjaman EUK/K-SP. Mereka yang memiliki tanggung jawab dalam pengembalian pinjaman akan selalu ingat terhadap pinjaman dan akan mengembalikannya tepat waktunya. Sementara mereka yang tidak bertanggung

jawab akan sepele kepada hutangnya dan akan menunggak membayar hutang tersebut dan menganggap remeh hutangnya.

Pemanfaat EUK/K-SP dengan karakter yang berbeda-beda membuat mereka memiliki kesadaran akan tanggungjawab mereka dalam pengembalian dana yang telah mereka pinjam di EUK/K-SP. Mereka yang bertanggung jawab dalam pengembalian pinjaman akan selalu tepat waktu yang telah disepakatinya dengan pihak EUK/K-SP tersebut. Sementara mereka yang kurang bertanggung jawab dalam pengembalian dana EUK/K-SP sering mengalami penunggakan dengan berbagai alasan. Hal tersebut membuat para pengelola EUK/K-SP kesulitan dalam melakukan penagihan dana kepada mereka.

Untuk mengatasi karakter pemanfaat yang seperti itu, maka pengelola EUK/K-SP memikirkan bagaimana cara yang ampuh agar mereka mau mengembalikan dana yang telah mereka pinjam. Tidak hanya oleh tim verifikasi saja persetujuan peminjaman tersebut, tetapi harus melalui kepala kelurahan untuk persetujuan terakhir dalam peminjaman dana tersebut.

c. Sumberdaya Finansial

Kurangnya sumberdaya finansial menyebabkan pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan/Kelurahan Simpan-Pinjam belum memadai. Hal ini dikarenakan fasilitas yang disediakan belum mencapai kategori baik, dilihat dari gedung Usaha Ekonomi Kelurahan/Kelurahan Simpan-Pinjam sendiri masih bergabung dengan Usaha Pengembangan Kesejahteraan masyarakat (UPKM). Selain dari itu kurangnya sarana penunjang lainnya seperti komputer, almari penyimpanan berkas, meja kursi dan lain sebagainya.

Dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan/Kelurahan Simpan-Pinjam, sumberdaya finansial merupakan faktor yang sangat penting untuk melengkapi sarana dan prasarana demi kesuksesan sebuah Program.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri melalui beberapa tahap yaitu pengajuan proposal, survey lapangan, keputusan kredit, legislasi, realisasi kredit, dan pemantauan dimana pada masing-masing tahap tersebut ada pula langkah-langkah yang dilakukan.
2. Pada UEK-SP Suma Mandiri pemisahan tugas dan tanggung jawab masih terdapat adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh kasir disamping bertugas sebagai pengelola kas sekaligus melakukan penyusunan laporan keuangan.
3. Praktek yang sehat dalam UEK-SP Suma Mandiri belum berjalan dengan baik.
4. Kredit macet yang terjadi pada periode 2018 hingga 2019 terus mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2018 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 123.834.808,- dan pada tahun 2019 jumlah tunggakan sebesar Rp. 90.805.371,-
5. Pengawasan pihak UEK-SP Suma Mandiri terhadap penggunaan dana kredit maupun pemantauannya terhadap kredit nasabah/pemanfaat kurang

maksimal sehingga sebagian nasabah/pemanafaat tidak menggunakan kreditnya tepat sasaran.

6. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UEK-SP Suma Mandiri maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri belum berjalan dengan efektif.

5.2. SARAN

Adapun saran yang diberikan yaitu :

1. Dalam pemisahan tugas dan tanggung jawab wewenang sebaiknya UEK-SP Suma Mandiri perlu ditingkatkan agar tidak terjadi rangkap jabatan.
2. Sebaiknya UEK-SP Suma Mandiri lebih lengkap dan teliti dalam mengumpulkan data pada nasabah/pemanafaat agar memperoleh informasi lebih banyak mengenai calon nasabah/pemanafaat dan usahanya.
3. Sebelum kredit diberikan, sebaiknya analisis kelayakan kredit dapat dijalankan secara efektif oleh tim verifikasi sehingga kredit yang diberikan dapat dipergunakan oleh nasabah/pemanafaat sesuai dengan permohonan kedit yang diajukan.
4. Sebaiknya pihak UEK-SP Suma Mandiri juga mengawasi penggunaan dana kredit, apakah sesuai dengan apa yang telah disepakati pada saat perjanjian kredit.
5. Sebaiknya pengendalian intern pada UEK-SP Suma Mandiri diterapkan lebih baik dengan membagi tugas dan wewenang secara jelas dan masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

6. Kepada karyawan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebaiknya diambil sebuah tindakan tegas agar pengendalian intern dalam pemberian kredit pada UEK-SP Suma Mandiri dapat berjalan dengan lancar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Amidipradja, Talman dan Wirasasmita, Rivai, (2014), *Neraca Euk-sp*, Pionir Jaya,. Bandung.
- Baridwan, Zaki, (2014), *Intennediate Accounting*. Edisi Tujuh, BPFE, Yogyakarta.
- Harahap Sofyan Syafri, (2016), *Teori Akuntansi*. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Hendar dan Kusnadi, (2014), *Ekonomi Euk-sp (Untuk Perguruan Tinggi)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakaarta.
- Jusup, Al Haryono, (2014), *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jilid Satu, Edisi Enam, Penerbit STIE YKPN.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, (2015), *Akuntansi Intermediate*. Jilid Satu, Edisi Ketujuh, Alih Bahasa Herman Wibowo, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Kusnadi, (2014), *Akuntansi Keuangan*. Edisi Pertama, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang.
- Pandji Anoraga, Nanik Widiyanti, (2015). *Manajemen Euk-sp Teori dan Praktek*. Edisi Pertama, Penerbit Pustaka Jaya, Semarang.
- Raharjo, Budi, (2014), *Aktiva dan Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*. Edisi I, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Riahi, Belkaoui, Ahmed, (2014), *Teori Akuntansi*. Buku Satu, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sukamdyo, Ign, (2016), *Manajemen Euk-sp*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Talman, Amidipradja R.H., Rivai Wirasasmita H. R.A., (2014), *Neraca Euk-sp*. Penerbit Pionir Jaya, Bandung.
- Tugiman, Hiro, (2016), *Akuntansi Untuk Badan Usaha Euk-sp*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, (2016) *Euk-sp dan Perekonomian Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Wirasasmita, Rivai, Ani Kenangasari, (2014), *Analisis Laporan Keuangan Euk-sp*. Edisi Pertama, Penerbit Pioneer Jaya, Bandung.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau